

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan Tugas dan Fungsi dalam Pengelolaan keuangan dan Aset daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan salah satu instansi Pemerintah Daerah yang menggunakan sistem informasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah. BPKAD selaku Satuan kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah telah menggunakan teknologi informasi sebagai infrastruktur untuk memberikan pelayanan pengelolaan keuangan SKPD dengan menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah- SIMDA FMIS (Financial Management Information System). Akan tetapi SIMDA FMIS yang digunakan masih terdapat beberapa kendala yaitu masih kurang efektif dan belum memaksimalkan proses pengelolaannya dengan baik, sistem yang masih belum dipahami, sehingga pengguna maupun user masih kurang paham dan waktu menjadi tidak efektif, masalah jaringan yang berakibat pada proses penginputan dan penatausahaan pertanggungjawaban keuangan menjadi terganggu/terlambat, administrasi dokumen yang kurang baik, sehingga dokumen pertanggungjawaban tidak sesuai ketentuan, penempatan SDM yang tidak sesuai kebutuhan, sehingga proses pengelolaannya menjadi lebih lama. Proses pertanggungjawaban yang seharusnya sudah selesai pada akhir tahun bahkan baru dapat diselesaikan pada tahun berikutnya. Permasalahan

yang dihadapi ini mengakibatkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah menjadi terlambat dan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan temuan permasalahan tersebut, maka diperlukan analisis kinerja pegawai yang diharapkan dapat menunjukkan bagaimana kondisi manajemen sistem yang ada dan memberi rekomendasi guna menghasilkan sebuah informasi yang sesuai sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Analisis kinerja pegawai yang dilakukan dengan pengukuran kinerja dengan tahapan identifikasi proses, menetapkan sasaran/standar kinerja, menetapkan ukuran kinerja, pengumpulan data, analisis pelaporan kinerja aktual, perbandingan kinerja aktual terhadap sasaran/standar dan usulan perbaikan dengan menggunakan metode kuantitatif.

Berdasarkan analisis sistem informasi dan pengukuran kinerja sistem yang dilakukan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi BPKAD dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah yang didukung sistem informasi manajemen yang ada sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi yaitu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang terdapat rumusan masalah yaitu “Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan Daerah yang tidak tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

1.3 Solusi

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka perlu dilakukan pengukuran analisis kinerja pegawai dengan metode penelitian kuantitatif.

1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dan Tujuan akhir yang diharapkan adalah, dengan analisis pengukuran kinerja pegawai ini dapat meningkatkan kinerja

pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Keterbatasan Penelitian

Mengingat penelitian ini masih memiliki kekurangan, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai dan dengan jumlah sampel yang lebih banyak lagi, sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan keterbaruan dalam penelitiannya.